

PRESIDEN PILIHAN UMMAT

(Rekaman Aspirasi Politik Muhammadiyah)

Penyusun

Drs. H. Ari Anshori M.Ag. dkk.

Pengantar

Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Sc.

Penerbit:

Muhammadiyah University Press

DAFTAR ISI

Pengantar Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta	5
Pengantar Tim Penulis	9
Bab I. Melacak Aspirasi Politik Ummat	13
Bab II. Muhammadiyah dan Kepemimpinan Nasional	21
Bab III. Rekaman Aspirasi Politik Muhammadiyah	29
Bab IV. Epilog: Ragam Tafsir Khittah Politik Muhammadiyah ...	165
Daftar Pustaka.....	172

PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam tertua dan terbesar di Indonesia yang notabene merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di seluruh dunia. Dengan jumlah anggota dan simpatisan yang mencapai puluhan juta, serta memiliki amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan serta layanan sosial lain Muhammadiyah memang layak dianggap sebagai pioneer gerakan Islam Modern.

Kemodernan atau kemajuan Muhammadiyah sebenarnya berakar pada ajaran dan pemahaman keagamaannya. Yaitu pemahaman yang merujuk secara cermat dan konsisten kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai petunjuk hidup dan kehidupan umat Islam. Dengan kembali kepada pokok ajaran Islam inilah Muhammadiyah justru bisa maju, terbuka pada temuan-temuan ilmu dan pengetahuan sekaligus memiliki kepedulian tinggi terhadap penderitaan masyarakat terutama dari golongan tidak mampu.

Sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan selalu bersikap netral dalam berpolitik. Bukan berarti tidak peduli atau tidak paham soal politik, melainkan tidak berpihak kepada kelompok politik tertentu. Hal ini disebabkan oleh kesadaran sepenuhnya bahwa politik adalah kegiatan yang bermuara kepada perebutan kepentingan dan kekuasaan, dan konsekuensinya membawa kepada persaingan dan permusuhan. Muhammadiyah selalu mencoba menjaga diri dari arus persaingan dan permusuhan tersebut, agar dapat tetap istiqomah dalam menjalankan misi sebagai gerakan sosial keagamaan.

Netral dalam berpolitik bukan berarti Muhammadiyah tidak memiliki kepentingan politik. Muhammadiyah jelas memiliki kepentingan politik, yaitu cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam bingkai ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Paling tidak ada tiga poin yang menjadi cita-cita Muhammadiyah.

Pertama, secara politik aspirasi Muhammadiyah adalah demokrasi, dalam pengertian sistem politik dan kepemimpinan yang memiliki kepekaan terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat banyak. Indonesia adalah negara demokrasi, dan dalam banyak hal barangkali Indonesia adalah negara Muslim terbaik dalam menerapkan sistem politik demokrasi. Kita mampu mengelola proses politik dan pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum yang teratur dan damai, dan bukan melalui kudeta dan kekerasan. Namun perlu juga diakui bahwa demokrasi kita masih jauh dari sempurna. Para elit politik terlihat masih lebih sibuk memikirkan bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasaan ketimbang mendengarkan apa yang diinginkan rakyat.

Kedua, secara ekonomi Muhammadiyah mencita-citakan kehidupan ekonomi yang makmur dalam kerangka solidaritas kemanusiaan. Sebuah sistem ekonomi yang berfokus pada upaya memberi dukungan dan kesempatan kepada kelompok menengah ke bawah. Islam memiliki sistem distribusi kesejahteraan ekonomi yang potensial melalui zakat, infaq dan shodaqoh. Namun sistem itu belum dikelola dengan baik dan belum dikembangkan sesuai konteks zaman. Diperlukan upaya kajian lebih lanjut untuk mengaktualkan ajaran-ajaran ekonomi Islam tersebut dalam kebijakan publik.

Ketiga, secara sosial Muhammadiyah mendambakan masyarakat yang berkemajuan, yang terbuka terhadap perkembangan-ilmu dan pengetahuan serta kesanggupan untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Al-Qur'an mengajari manusia untuk membaca dan memahami, dan untuk selalu memiliki visi ke masa depan. Dan dengan amal-usaha yang berjumlah ribuan—terutama dalam bidang pendidikan—Muhammadiyah telah ikut berperan serta dalam mewujudkan cita-cita masyarakat berkemajuan ini.

Tidak bisa dipungkiri, kemudian, bahwa cita-cita di atas hanya akan terwujud melalui peran proaktif dan negara. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk memilih para pengelola negara yang memiliki visi yang sama dengan Muhammadiyah, dan juga memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankannya.

Buku ini menjadi salah satu upaya untuk mendiskusikan sosok

seperti apa yang layak untuk memimpin bangsa ini. Dan pada titik ini kita perlu bersyukur bahwa kita sudah memiliki sistem demokrasi yang stabil, dimana masyarakatlah yang memiliki hak dan wewenang memilih siapa yang dianggap layak untuk memimpin. Dan pemimpin yang terpilih dengan mandat dari rakyat memiliki tanggungjawab untuk mendengarkan suara dan kepentingan rakyat yang telah memilihnya.

Terbukti Muhammadiyah memiliki perhatian yang tinggi terhadap perkembangan politik di negeri ini. Berbagai kriteria yang multi-dimensi diajukan sebagai syarat bagi yang hendak menjadi pemimpin politik mulai dari agama dan moralitas, kapasitas dan kapabilitas personal, hingga popularitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman warga Muhammadiyah terhadap politik sudah sangat kompleks dan maju. Seorang pemimpin politik memang harus memiliki kapabilitas untuk memenangkan perebutan kekuasaan, sekaligus hati nurani untuk melaksanakan cita-cita dan amanat rakyat.

Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si.

PENGANTAR TIM PENULIS

Buku ini merupakan publikasi dari penelitian kualitatif mengenai pandangan warga Muhammadiyah terkait persoalan demokrasi, pemerintahan, serta kepresidenan. Meskipun mengambil tema tentang presiden, bertepatan dengan akan dilaksanakannya pemilu presiden pada Juli tahun 2009, penelitian ini mencoba memotret gambar yang lebih besar tentang pandangan warga Muhammadiyah mengenai sistem demokrasi, dimana mekanisme pemilihan presiden merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri.

Upaya menangkap pandangan warga Muhammadiyah mengenai politik demokrasi sangat penting baik secara teori maupun empirik. Secara teoritik, perkembangan politik di Indonesia selama satu dekade ini telah menyumbangkan wacana baru dalam kajian demokratisasi. Sebelumnya, banyak pandangan yang menganggap bahwa Islam tidak sejalan dengan demokrasi, karena yang satu berbasis nilai-nilai teologis-transenden sedangkan yang lain bertopang nilai-nilai humanis-empiris. Bahkan ketika kajian teoritik menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam pun ada elemen-elemen demokrasi—seperti *Syura* dan *Ijtima*—para pengkritik masih juga menyangkal dengan mengatakan bahwa dalam kenyataannya belum pernah ada negara Islam, ataupun masyarakat Muslim yang mampu mengembangkan sistem politik demokratis. Perkembangan politik di Indonesia sepuluh tahun terakhir menjadi stempel bahwa negeri Muslim terbukti mampu membangun sistem politik yang demokratis.

Sedangkan secara empirik, kajian ini sangat signifikan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pendapat warga Muhammadiyah terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Satu hal yang sebenarnya menjadi poin penting politik negeri ini, bukanlah sekedar bahwa Indonesia menjadi negeri Muslim terbesar yang mampu membangun demokrasi, namun lebih kepada fakta bahwa proses demokratisasi di negeri ini ditokohi oleh aktor-aktor dan organisasi-organisasi Islam. Muhammadiyah merupakan salah satu pilar proses transisi dan konsolidasi demokrasi, karena itu komitmen organisasi ini kepada politik demokrasi akan menjadi salah satu penentu

keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Sedangkan topik tentang presiden dijadikan sebagai poin utama. *Pertama*, karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana presiden memiliki kekuasaan cukup besar sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. *Kedua*, masyarakat kita masih berada dalam budaya patrimonialisme yang cenderung mempersonifikasikan kehidupan politik. Sehingga, dalam *framework* budaya tersebut, figur presiden bukan hanya sekedar merepresentasikan sebuah posisi jabatan publik *an sich*—seberapa pun besar otoritas dan kekuasaannya—namun juga mengingatkan orang pada figur raja yang merupakan representasi tatanan kosmis. Sosok presiden bukan hanya bertanggungjawab menjalankan roda pemerintahan, ia bertanggungjawab menjaga ketentraman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Riset ini dilaksanakan sepanjang bulan Desember hingga Februari 2009, dengan mewawancarai 37 responden yang kesemuanya merupakan pengurus di jajaran organisasi Muhammadiyah dan organisasi otonom di bawahnya di pulau Jawa, mulai dari yang tertinggi di Pimpinan Pusat hingga yang paling rendah di Pimpinan Ranting dan ada beberapa responden yang secara khusus diambil dari beberapa Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di luar negeri. Secara metodologis, pilihan responden yang selektif-purposif seperti ini memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Kekurangannya, karena sampel yang diambil adalah pengurus formal organisasi maka sangat memungkinkan riset ini tidak akan mampu merekam suara para anggota dan simpatisan Muhammadiyah yang lebih beragam. Sebagai organisasi yang sangat aktif dan terlibat langsung dengan berbagai dinamika dan perkembangan di masyarakat, komunitas Muhammadiyah pasti memiliki keragaman dan dinamika yang lebih tinggi dari fakta yang direpresentasikan oleh para pengurusnya. Namun pilihan responden semacam ini juga memiliki kelebihan, yaitu sampel para pimpinan formal akan lebih dapat menangkap arah dan gerak Muhammadiyah sebagai organisasi. Sebab sebagai sebuah organisasi Muhammadiyah bisa dikatakan sangat sistematis-birokratis dan metodologis, dalam arti perilaku organisasi lebih didasarkan kepada

keputusan-keputusan para pengurus, dan bukan arahan, dorongan ataupun tekanan komunitas atau tokoh informal. Selanjutnya, sampel penelitian diambil dari berbagai daerah yang memiliki faktor geografis, sosiologis dan kultural yang beragam—yaitu, wilayah pesisir dan pedalaman, serta wilayah perkotaan dan pedesaan—yang diharapkan dapat mewakili keragaman yang ada di kalangan warga persyarikatan.

Adapun komposisi responden sebagai berikut: Untuk pimpinan pusat Muhammadiyah terdiri atas enam pengurus PP Muhammadiyah dan satu pengurus PP 'Aisyiyah, kemudian untuk organisasi otonom di bawah Muhammadiyah tercatat ada 3 pimpinan ortom yang terlibat aktif sebagai responden yakni perwakilan dari Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Ikatan Remaja Muhammadiyah, sedang untuk Nasyiatul 'Aisyiyah diambil satu responden. Responden di tingkatan propinsi terdiri atas tiga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan tiga Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA). Pada tingkatan Kabupaten atau Kotamadya responden diambil dengan komposisi lima Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan tiga Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA). Di tingkatan di bawahnya yakni tingkat kecamatan, sampel diambil dari tiga Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan dua Pimpinan Cabang 'Aisyiyah (PCA). Pun demikian dengan pengurus di level kelurahan terdiri atas tiga responden Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) dan dua Pimpinan Ranting 'Aisyiyah (PRA). Sedang untuk PCIM tim peneliti mewawancarai dua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) yakni PCIM Australia dan PCIM Amerika Serikat.

Dalam riset ini ada tujuh pertanyaan pokok terbuka yang diajukan kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menyangkut masalah, demokrasi dan proses reformasi 10 tahun terakhir; peran dan fungsi seorang presiden; Tentang para presiden Indonesia di masa lalu; kemampuan kultural (*solidarity maker*) dan administratif (*administrator*) presiden; prioritas program-kerja presiden terpilih ke depan; faktor gender, suku, agama calon presiden; Kriteria dan nama calon presiden dan mengenai Muhammadiyah dan politik

Di dalam menarasikan hasil respondensi tim peneliti dengan responden yang ada, peneliti menggunakan struktur kalimat langsung,

dengan harapan agar tidak terjadi sekat antara pembaca sekalian dengan responden. Dan memungkinkan responden berbicara langsung kepada para pengambil kebijakan sebagai bagian dari aspirasi warga Muhammadiyah yang tidak bisa dinafikan. *Selamat Membaca!*

Surakarta, Medio Mei 2009

Tim Penulis